

TESIS
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT KENAGARIAN
MALALAK SELATAN MELALUI
PENGADILAN AGAMA KELAS II MANINJAU

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DOSEN PEMBIMBING:

1. Prof.Dr.H.YASWIRMAN, MA

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2019

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT
KENAGARIAN MALALAK SELATAN MELALUI
PENGADILAN AGAMA KELAS II MANINJAU**

(Nofarina Febri Siska, NIM.1620123054, Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 137 Hlm, 2019)

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang sah pula. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang telah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tercatat pada pihak yang berwenang dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan. Namun di Kenagarian Malalak Selatan yang terjadi pada perkawinan yang dilakukan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga membuat pihak suami istri tidak memiliki bukti perkawinan dalam bentuk akta nikah. Oleh sebab itu, pihak Pengadilan Agama Kelas II Maninjau, Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, dan Pemerintah Nagari Malalak Selatan melakukan suatu upaya untuk memudahkan pasangan suami istri dengan melakukan sidang itsbat nikah keliling. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kenagarian Malalak Selatan Melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Hasil penelitian adalah (1). Alasan masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, (2). Pelaksanaan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau dalam hal pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan tindakan pemberitahuan terhadap masyarakat Nagari Malalak Selatan sampai keluarnya Itsbat nikah, (3). Akibat hukum setelah dikeluarkan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau ialah terjaminnya kepastian hukum bagi pasangan suami istri, anak baik berupa hak dan kewajiban para pihak, harta bersama, dan kewarisan setelah perkawinan dicatatkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Itsbat Nikah, Akibat Hukum Itsbat Nikah.

THE IMPLEMENTATION OF ITSBAT MARRIAGE

FOR SOUTH MALALAK COMMUNITIES THROUGH MANINJAU RELIGION COURT CLASS II

(Nofarina Febri Siska, NIM.1620123054. Master of Notary Study Program,
Faculty of Law Universitas Andalas, 137 Page, 2019)

ABSTRACT

Marriage is a legal act that gives birth to legal consequences in the form of rights and obligations. Legitimate marriages also have legal consequences. The State of Indonesia is a Law State that has established marital legislation such as Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law. In Article 2 paragraph (1), (2) of Law Number 1 of 1974, it is explained that every marriage conducted according to religious law and its trust must be registered with the authorized party with the aim of obtaining legal certainty against marriage. However, in the South Malalak communities that occurred in the marriages performed was not listed in the Religious Affairs Office (KUA), thus making the husband and wife do not have proof of marriage in the form of a marriage certificate. Therefore, the Maninjau Class II Religious Court, the Malalak District Religious Affairs Office, and the South Malalak Government made an effort to make it easier for married couples to conduct a round of marriages for marriage. Based on the above, the author is interested in conducting research on The Implementation Of Itsbat Marriage For South Malalak Communities Through Maninjau Religion Court Class II. The method used in this study is juridical-empirical, namely research based on field research to obtain primary data in the field of law. The results of the study are (1) The reason for the people of South Malalak communities to conduct their marriage to the Class II Maninjau Religious Court is due to the emergence of legal awareness about the importance of marriage registration, (2) The implementation of the marriage certificate in South Malalak communities by the Maninjau Class II Religious Court in terms of recording the marriage is by taking notice of the South Malalak communities until the issuance of the marriage certificate, (3) The legal consequences after the issuance of marriage licenses in South Malalak communities by the Class II Religious Court of Maninjau is the assurance of legal certainty for married couples, children in the form of rights and obligations of the parties, joint assets and inheritance after marriage is recorded as stipulated in legislation - invitation.

Keywords: Unlisted Marriage, Itsbat Marriage, Due to the Law of Itsbat Marriage